



Mengkaji Efektivitas Pemilihan Umum di Masa Pandemi Covid-19 dari Pendekatan Program Riset

Rahmawati^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poso, Indonesia

¹ rahmawati353@guru.smp.belajar.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Mei 2021;

Revised: 18 Mei 2021;

Accepted: 27 Mei 2021.

Kata-kata kunci:

Covid-19;

Efektivitas;

Masa Pandemi;

Pemilihan Umum;

Program Riset.

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dilaksanakannya Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Proses mengetahui tersebut dijelaskan dalam perspektif Imre Lakatos, terutama untuk menanggapi fenomena yang disebutkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan, sumber data penelitian berasal dari sumber-sumber yang telah terkumpul dari perpustakaan. Hasil penelitian mencakup mengenai pelaksanaan Pilkada di masa pandemi menuai banyak kontroversi, namun Pilkada serentak tetap dilaksanakan. Pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi jika dilihat dari perspektif metodologi program riset Imre Lakatos, maka dapat menciptakan kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Dengan mengkaji regulasi yang akan digunakan di Pilkada dengan metodologi program riset gagasan Imre Lakatos, dapat ditemukan kebijakan paling tepat yang dapat melancarkan penyelenggaraan Pilkada. Rekomendasi penelitian yaitu penyelenggaraan Pilkada memerlukan lapisan pelindung yaitu kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kesehatan masyarakat.

Keywords:

Covid-19;

Effectiveness;

Pandemic Era;

General Election;

Research Program.

ABSTRACT

Reviewing the Effectiveness of Elections in the Covid-19 Pandemic From the Research Program Approach. The purpose of this study is to find out how the election is run in the midst of the Covid-19 pandemic. The process of knowing is described in the perspective of Imre Lakatos, primarily in response to the phenomena. The research methods used in this study use literature research methods with qualitative approaches to obtaining descriptive data. Data collection taken in this study by conducting literature studies, research data sources come from sources that have been collected from the library. The results included the implementation of elections in the pandemic period attracted a lot of controversy, but simultaneous elections were still carried out. The implementation of elections simultaneously in the pandemic period when viewed from the perspective of the Imre Lakatos research program, it can create the right policies in the implementation of elections in the pandemic. By reviewing the regulations that will be used in pilkada with the methodology of imre lakatos idea research program, the most appropriate policy can be found that can launch the implementation of elections. The recommendations was requiring a protective layer, namely policies that prioritize public health.

Copyright © 2021 (Rahmawati). All Right Reserved

How to Cite : Rahmawati, R. (2021). Mengkaji Efektivitas Pemilihan Umum di Masa Pandemi Covid-19 dari Pendekatan Program Riset. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(3), 79–84.
<https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i3.425>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Tahun 2020 adalah tahun yang cukup berat bagi umat manusia di seluruh dunia. Di akhir tahun 2019 muncul sebuah virus di negara Tiongkok yang menggemparkan dunia. Virus yang pada awalnya menyebar dengan cepat di kota Wuhan itu disebut sebagai virus Covid-19 atau dikenal juga sebagai virus corona. Virus ini menyebar secara masif di negeri tirai bambu dan lantas membuat kehidupan dan ekonomi disana lumpuh seketika. Tidak butuh waktu lama, selang beberapa bulan setelah virus ini ditemukan, virus ini mulai menyebar ke negara-negara di seluruh dunia. Banyak negara di seluruh dunia yang pada akhirnya terkena dampak dari virus ini, salah satunya negara kita Indonesia. Dengan telah menyebarnya wabah Covid-19 ini ke seluruh dunia, wabah ini dikenal dengan nama pandemi Covid-19 (Radhitya, Nurwati, & Irfan, 2020).

Pandemi ini menyebar begitu cepat dari manusia ke manusia, sehingga banyak negara yang menerapkan *lockdown* untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Tidak hanya *lockdown*, kebijakan preventif lain juga diterapkan untuk memutus rantai penyebaran virus ini, mulai dari kewajiban penggunaan masker hingga penerapan *social distancing*. Kebijakan tersebut juga diterapkan di Indonesia, karena jumlah pasien yang terjangkit virus Covid-19 sendiri di Indonesia cukup banyak. Salah satu kebijakan yang cukup ramai diperbincangkan pada awal masa pandemi di Indonesia adalah adanya pelarangan kegiatan yang memicu berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang banyak seperti acara pernikahan hingga konser musik. Semua bentuk acara yang membuat kerumunan tidak diperbolehkan dan jika ada yang nekad maka akan dihentikan secara paksa (Bellina, dkk., 2020).

Muncul kontroversi di akhir tahun, dimana pada waktu itu akan diselenggarakan pilkada di beberapa daerah di Indonesia. Pilkada pun tetap berjalan ditengah adanya kebijakan *social distancing*. Bahkan beberapa calon kepala daerah menyelenggarakan kampanye dan mengundang banyak kerumunan. Hal ini tentu memicu kontroversi di tengah masyarakat, selain tidak mengindahkan penerapan protokol kesehatan yang baik, adanya hal seperti ini juga dirasa tidak adil. Hal ihwal mengenai rumusan masalah ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dijalankan di tengah pandemi Covid-19? Kedua, bagaimana perspektif Imre Lakatos dalam menyikapi hal seperti ini?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dijalankannya Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Proses mengetahui tersebut dijelaskan dalam perspektif Imre Lakatos, terutama untuk menanggapi fenomena yang disebutkan. Dalam mengkaji fenomena penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi Covid-19 ini, penulis menggunakan perspektif keilmuan dari Imre Lakatos.

Imre Lakatos memiliki nama asli Imre Lipschitz dan lahir di Hungaria pada 9 November 1922. Lakatos menyelesaikan pendidikannya di Hungaria dan mendapatkan ijazah dalam bidang matematika, fisika dan juga sains pada tahun 1944 di University of Debrecen. Lakatos kemudian pindah menuju London dan mendapatkan gelar Ph.D di Cambridge University pada tahun 1961. Lakatos dikenal sebagai filsuf tersohor, khususnya di bidang matematika. Imre Lakatos dikenal karena kritisnya terhadap pemikiran Popper dan Kuhn. Kritik ini kemudian dikembangkan oleh Lakatos menjadi sebuah metodologi program riset. Perspektif dari metodologi inilah yang kemudian akan penulis terapkan dalam mengkaji fenomena pemilu di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif (Arikunto, 2010). Pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan, sumber data penelitian berasal dari sumber-sumber yang telah terkumpul dari perpustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah penelitian yang sumber-sumber datanya terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian membahas tiga hal yaitu, pertama tentang kondisi Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Virus Covid-19 pada awalnya muncul pertama kali di sebuah pasar hewan dan makanan laut yang ada di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Dilaporkan juga bahwa pasien pertama yang terjangkit virus ini adalah seorang pedagang di pasar tersebut. Hal tersebut diduga virus ini berasal dari hewan liar yang ada disana, kemudian menular dari hewan ke manusia, dan manusia ke manusia. Kasus pertama Covid-19 di China dan di dunia tercatat ditemukan pada akhir bulan Desember tahun 2019 (Levani, Prastya, & Mawaddatunnadila, 2021; Kriswibowo, & Utomo, (2020).

Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia setelah 3 bulan virus ini ditemukan, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Pasien mengaku mengalami kontak fisik dengan turis berkebangsaan Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Kasus kematian pertama yang disebabkan oleh Covid-19 di Indonesia tercatat terjadi pada 11 Maret 2020, korban adalah seorang pria berusia 59 tahun asal kota Solo. Setelah ditemukannya kasus pertama ini, secara berkala kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Selang beberapa bulan setelah kasus pertama ditemukan, kasus Covid-19 di Indonesia menyentuh angka seratus ribu kasus, hal ini disampaikan oleh pemerintah pada tanggal 27 Juli 2020, dan angka ini pun masih terus naik lagi. Terbayang bagaimana virus ini menyebar begitu cepat ke seluruh Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melihat kasus Covid-19 yang semakin meningkat ini. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 akhirnya dibentuk pada 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Pemerintah juga menerapkan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus corona diantaranya adalah mewajibkan penggunaan masker, menjaga jarak, dan menerapkan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di fasilitas umum (Tina Kartika, 2020). Jadi, pada intinya kegiatan atau acara yang dapat mengundang kerumunan tidak diperbolehkan, karena dapat menambah resiko penularan virus Covid-19. Sehingga hampir seluruh kegiatan yang ada di masa-masa ini dibatasi dengan sangat ketat, banyak kegiatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari akhirnya dibatalkan.

Penjelasan kedua adalah tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Di tahun yang sama dengan adanya pandemi Covid-19, Pilkada serentak juga akan dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Penetapan calon dilakukan pada 23-24 September 2020, masa kampanye juga telah dimulai dan akan berlangsung hingga 5 Desember 2020. Proses pemungutan suara sendiri dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pilkada serentak ini telah mengalami penundaan, dari rencana awal direncanakan akan diselenggarakan pada 23 September 2020.

Penyelenggaraan Pilkada serentak ini menuai cukup banyak kontroversi. Jelas saja, pelaksanaan Pilkada dikhawatirkan dapat menciptakan kerumunan, yang dapat memicu lonjakan kasus Covid-19. Disamping itu, kegiatan masyarakat yang juga memicu kerumunan dilarang oleh pemerintah, namun Pilkada serentak tetap berjalan. Hal inilah yang membuat pelaksanaan Pilkada serentak menuai banyak kontroversi, baik itu oleh masyarakat maupun oleh para akademisi dan para ahli.

Penyelenggaraan pemilu memang dirasa cukup penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilu memiliki efek positif bagi terselenggaranya sebuah demokrasi. Dalam pemilu, masyarakat juga terlibat dalam mengendalikan kebijakan. Pelaksanaan pemilu juga merupakan bentuk kesadaran politik oleh masyarakat. Karena beberapa alasan itulah, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 perlu segera dilaksanakan. Pemerintah juga mengklaim bahwa angka kasus Covid-19 telah mengalami penurunan, sehingga dirasa sudah cukup aman untuk melaksanakan Pilkada serentak. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia adalah terlaksananya Pemilu di Korea Selatan dengan baik. Keberhasilan Pemilu

di Korea Selatan ini akhirnya menjadi dorongan bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Pilkada serentak yang sempat tertunda.

Pilkada 2020 menghadapi tantangan yang cukup besar, Pilkada serentak harus dilaksanakan di tengah wabah yang tidak bisa diremehkan. Pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020 ini mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan sehat. Pelaksanaan Pilkada serentak pada akhirnya tetap dilaksanakan dengan pengawasan yang cukup ketat, khususnya dalam pemenuhan protokol kesehatan. Mulai dari kampanye hingga proses penghitungan suara, semuanya harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Beberapa diantaranya adalah dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) pun dirasa belum cukup, kasus Covid-19 di Indonesia pun juga masih tinggi, tidak seperti Korea Selatan yang sudah berhasil menekan kasus Covid-19 sebelum diselenggarakannya Pemilu disana. Penanganan Covid-19 di masa sebelum dilaksanakannya Pilkada pun juga belum berjalan dengan efektif, angka kematian di Indonesia yang disebabkan oleh Covid-19 juga masih cukup tinggi, ditambah lagi waktu yang cukup mepet untuk mempersiapkan regulasi berjalannya Pilkada serentak di masa pandemi.

Anggaran yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan Pilkada serentak ini pun cukup banyak, banyak pihak yang menyanggah pengeluaran dana sebesar ini. Banyak pihak yang menyatakan bahwa anggaran besar yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan Pilkada serentak lebih dialokasikan untuk penanganan Covid-19, mengingat penanganan Covid-19 juga memerlukan anggaran yang sangat banyak. Resiko utama yang dihadapi saat penyelenggaraan Pilkada serentak tidak hanya dalam hal penularan Covid-19 yang akan membuat kasus Covid-19 di Indonesia, diluar itu ada ancaman lain yaitu tidak terlaksana dengan lancar Pilkada serentak 2020 dan hanya akan membuang-buang anggaran negara.

Pilkada serentak terancam tidak berjalan dengan lancar, hal ini dikarenakan adanya ketakutan dari para petugas atau pengawas TPU akan terjangkit virus Covid-19 karena akan bertemu dengan banyak orang, hal ini dapat membuat mereka mengundurkan diri dari tugasnya sebagai pengawas TPU. Selain itu juga ada kemungkinan adanya penolakan oleh tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat. Hal-hal seperti ini jika benar terjadi akan mengganggu terlaksananya Pilkada serentak. Di luar kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak, Pilkada serentak 2020 akhirnya tetap diselenggarakan. Pilkada akhirnya tetap diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, jumlah warga yang menghadiri TPU pun juga dibatasi menjadi 50% dari kapasitas maksimal. Bawaslu pun mengklaim berjalannya Pilkada serentak 2020 berjalan dengan lancar (Afifuddin, 2020; Ristyawati, 2020).

Penjelasan ketiga yaitu fokus pada perspektif Imre Lakatos dalam mengkaji fenomena penyelenggaraan pilkada serentak di masa pandemi. Imre Lakatos memperkenalkan metodologi program riset yang digunakan untuk mengkaji sebuah teori. Metodologi ini terdiri dari inti pokok atau *hardcore* yang merupakan asumsi dasar yang tidak dapat ditolak atau dimodifikasi dan terlindungi dari ancaman falsifikasi. Kemudian diluar inti pokok terdapat lapisan pelindung yang melindungi *hardcore*. Lapisan pelindung ini terdiri dari hipotesa-hipotesa.

Dalam kasus penyelenggaraan Pilkada serentak di masa pandemi ini, yang menjadi inti pokok adalah asumsi bahwa Pilkada harus segera dilaksanakan. Sedangkan lapisan pelindungnya adalah penerapan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kesehatan masyarakat. Dengan metodologi seperti ini, kita dapat menemukan solusi dari penyelenggaraan Pilkada serentak di masa pandemi yang tidak akan menambah jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Misalnya, biasanya pelaksanaan Pemilu menggunakan jarum untuk mencoblos surat suara, jelas penggunaan jarum ini akan sangat beresiko digunakan oleh orang banyak (Wulandari, 2019). Dengan metodologi program riset dan kebijakan yang mengutamakan kesehatan masyarakat sebagai lapisan pelindung *hardcore*, dapat ditemukan sebuah solusi dimana penggunaan jarum sebagai alat coblos tidak memenuhi syarat untuk melindungi

kesehatan masyarakat, maka penggunaan jarum dapat diganti misalnya dengan menggunakan tusuk gigi sekali pakai atau dengan menggunakan alat yang lancip dari rumah.

Dengan melakukan metodologi riset Imre Lakatos seperti ini, pemerintah dapat menentukan kebijakan apa yang tepat dilakukan untuk mendukung berjalannya Pilkada serentak di masa pandemi (Anggita, 2021). Dengan “pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi” sebagai inti pokok, maka pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi akan kebal terhadap serangan falsifikasi. Dan juga menempatkan “penerapan kebijakan yang mengutamakan kesehatan masyarakat” sebagai lapisan pelindung akan membuat pemerintah lebih mudah menemukan cara yang tepat untuk menyelenggarakan Pilkada serentak di masa pandemi tanpa mengesampingkan kesehatan masyarakat.

Jadi, metodologi program riset disini dapat digunakan pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi. Pemerintah dapat tetap melaksanakan Pilkada serentak, di sisi lain pelaksanaan Pilkada serentak ini tidak memicu melonjaknya kasus Covid-19. Namun program riset ini harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya Pemilu, karena dibutuhkan perencanaan yang matang agar pelaksanaan Pilkada benar-benar berjalan dengan baik.

Simpulan

Wabah Covid-19 telah menghambat hampir semua kegiatan manusia yang biasa dilakukan tanpa adanya gangguan suatu wabah. Salah satu yang terdampak adalah penyelenggaraan Pemilu yang biasanya dilakukan dengan normal kini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Penyelenggaraan Pemilu dalam sebuah negara demokrasi memang sangat penting, Pemilu seolah menjadi alat utama bagi masyarakat untuk turut andil dalam politik negara. Meskipun pelaksanaan Pilkada di masa pandemi menuai banyak kontroversi, namun Pilkada serentak tetap dilaksanakan. Pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi jika dilihat dari perspektif metodologi program riset Imre Lakatos, maka dapat menciptakan kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Dengan mengkaji regulasi yang akan digunakan di Pilkada dengan metodologi program riset gagasan Imre Lakatos, dapat ditemukan kebijakan paling tepat yang dapat melancarkan penyelenggaraan Pilkada serentak di masa pandemi dengan tetap mengutamakan kesehatan masyarakat. Dengan begitu, proses berjalannya demokrasi akan tetap berjalan sebagaimana harusnya, dan lonjakan kasus Covid-19 dapat diantisipasi dengan baik.

Referensi

- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Elex Media Komputindo.
- Anggita, R. D. (2021). Legitimasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Supremasi*, 63-80.
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, A. A. (2006). Pemikiran Imre Lakatos (1922-1974) tentang Metodologi Program Riset dan Signifikansinya dalam Kajian Keislaman. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 42-55.
- Bellina, S., Cahyaningrat, C. T. T., & thalia Putri, A. S. (2020). Dampak Karantina Wilayah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 18-30.
- Fajar, N. M. A. P. (2020). Urgensi Dan Problematika Pemilu Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Yustitia*, 14(2), 82-89.
- Kriswibowo, A., & Utomo, S. A. P. (2020). *Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19*. Penerbit Cakradewa Ilmu.
- Levani, Y., Prastya, A. D., & Mawaddatunnadila, S. (2021). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 17(1), 44-57.
- Maharani, A., & Efriza, E. (2021). Manajemen Strategis Pilkada Serentak 2020: Belajar Dari Suksesnya Pemilu Korea Selatan Di Tengah Pandemi Covid-19 (Strategic Management Of Local Election

- 2020: Learning From The Success Of South Korea Election Under The Covid-19). *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(10), 199-214.
- Prawitasari, I., & Erowati, D. (2021). Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1176-1183.
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111-119.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85-96.
- Sakbani, Y. (2020). Urgensi Manajemen Risiko Pemilu Pada Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Perlindungan Hak Pilih Warga Masyarakat). *Jwp (Jurnal Wacana Politik)*, 5(2), 124-135.
- Tina Kartika, T. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) Dengan Pendekatan Komunikasi, Media Dan Budaya. *Al-Misbah, Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 16(1), 75-94.
- Wulandari, A. A. (2019). Cendekiawan dan Kekuasaan Perspektif Yudi Latif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).